



JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA

e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857

Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>

Faculty of Politics Governance, Governance of Home Affairs (IPDN)

JPPDP, Vol 15 No. 1

Doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.2260>

POLITIK, INOVASI, DAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kartiwi¹, Adfin R. Baidhowah^{2*}, Karolina Wenggi³

¹²³Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: kartiwi@ipdn.ac.id¹, adfinbaidhowah@ipdn.ac.id², karolina@ipdn.ac.id³

*corresponding author

E-mail: adfinbaidhowah@ipdn.ac.id

Abstract

Innovation has become an inevitable concept in today's development policy. However, innovation in development is an idea that is often used by political actors for their political agenda. By using qualitative methods, this research aims to find out how the political aspect in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency is framing this innovation. We found that the innovations that have been carried out by the village become a bargaining position for the village if there is an election for both village heads and regional heads. The majority of candidates will state their commitment to support the development of innovations carried out. Politicians do not promise to do innovation A or B but to support existing and future innovations.

Keywords: *politics, development innovation, government*

Abstrak

Inovasi telah menjadi konsep yang tak terelakan dalam kebijakan pembangunan dewasa ini. Namun demikian, inovasi dalam pembangunan merupakan sebuah gagasan yang sering dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk agenda politis mereka. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek politik di Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul melakukan framing inovasi ini. Kami menemukan bahwa inovasi yang sudah dilakukan oleh desa menjadi bargaining position bagi desa apabila ada pelaksanaan pemilihan baik kepala desa maupun kepala daerah. Para calon mayoritas akan menyatakan komitmen dalam mendukung pengembangan inovasi yang dilakukan. Para politisi tidak berjanji akan melakukan inovasi A atau B melainkan mendukung inovasi yang sudah ada dan yang akan dilaksanakan.

Kata Kunci: politik, inovasi pembangunan, pemerintahan

PENDAHULUAN

Inovasi telah menjadi konsep yang tak terelakan dalam kebijakan pembangunan dewasa ini (Chataway & Hanlin, 2013; Pansera & Richard, 2019). Hal ini bertujuan untuk menghasilkan ‘barang sosial’ seperti pengentasan kemiskinan yang berfokus pada solusi dari pasar inovatif, pembukaan akses pasar yang belum terjangkau, dan pengeksploitasian potensi kekayaan dari ‘bottom of the pyramid’ (Pansera & Richard, 2019). Inovasi dalam pembangunan disyaratkan untuk mengadopsi unsur inklusivitas demi menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat (Chataway & Hanlin, 2013; Pansera & Owen, 2019).

Sejak Indonesia menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat terus mendorong munculnya inovasi-inovasi di daerah, tidak terkecuali di level desa. Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan bahwa salah satu fokus dari pembangunan desa adalah dengan mendorong inovasi dalam pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam melalui perspektif

intergenerational serta inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Bidang pariwisata yang berbasis alam merupakan salah satu potensi ekonomi lokal yang secara umum menjadi ‘produk’ unggulan dari desa-desa di Indonesia, termasuk Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul. Di tahun 2017, Desa Nglanggeran meraih penghargaan dari ASEAN dengan kategori desa wisata terbaik (Nglanggeran-patuk.id, 2017). Inovasi tersebut berupa implementasi e-ticketing dalam manajemen desa wisata. Penerapan e-ticketing ini memberikan dampak positif pada pencegahan kebocoran pendapatan asli desa, transparansi manajemen wisata, dan pendataan jumlah income serta kunjungan wisatawan yang baik.

Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul mengandalkan tiga bidang utama dalam rangka bersaing kualitas pariwisata di level nasional dan internasional, yaitu wisata alam yang menampilkan keindahan dan keasrian lingkungan yang terdiri dari gunung, embung, air terjun, dan

curug, wisata kuliner, dan agrowisata.

Namun demikian, ahli dalam bidang inovasi dan pembangunan (Pansera & Richard, 2019) menyadari bahwa inovasi dalam pembangunan merupakan sebuah gagasan yang sering dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk agenda politis mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek politik di Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul melakukan framing inovasi ini. Penelitian ini berfokus pada analisa pembangunan desa yang didorong oleh inovasi pada desa yang berkategori desa maju dengan memiliki potensi sumber daya alam unggulan. Dikarenakan inovasi dalam pembangunan tidak akan terlepas dari pengaruh-pengaruh politik, penelitian ini menganalisa bagaimana framing-framing politik mempengaruhi inovasi yang diciptakan dalam pembangunan desa tersebut.

Politik dalam Inovasi dan Inovasi dalam Pembangunan

Beberapa ahli berargumen bahwa pemungutan suara (pemilu) merupakan model reward dan punishment (Dassonneville and

Lewis-Beck, 2014). Hal ini menjelaskan bahwa pemilih memberikan respon positive dengan memilih kepada inkumben yang mereka sukses dalam memperbaiki ekonomi. Sebaliknya, pemilih akan memberikan respon negative dengan tidak memilih kepada inkumben yang mereka tidak sukses dalam memperbaiki ekonomi. Pemilih dalam hal ini dianggap memiliki *rational choice* (pilihan rasional), dimana pemilih selalu mencoba untuk memilih representative dalam pemilu yang berkualifikasi (Key, 1966). Rummaya et al. (2020) berpendapat bahwa untuk kasus pemilihan lokal di Indonesia, indikator GDP per kapita dan pengangguran memiliki dampak positif terhadap hasil pilkada. Namun, *competence* (performa ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah) lebih berpengaruh dari pada *luck* (performa ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dikarenakan pengaruh dari ekonomi nasional). Lebih lanjut, penelitian ini berpendapat bahwa pemilih lebih memberikan perhatian kepada performa inkumben pada akhir tahun masa jabatannya. Dengan konteks daerah yang identic dengan

keunggulan wisata, para inkumben akan berfikir penuh bagaimana meningkatkan potensi wisata di daerah tersebut dengan melakukan inovasi-inovasi.

Dalam proses pembuatan inovasi, peran dari civil society, private sector, dan pemerintah akan sangat menentukan kesuksesannya. Ketiganya dalam skema konsep governance akan membentuk sebuah network dengan karakteristik berupa (Alford & O'Flynn, 2012):

- a. Hubungan horizontal, lintas institusi dan sektor. Network tidak dihubungkan dalam struktur otoritas tunggal, yaitu multi level dari pemerintahan (pusat dan daerah) serta organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Network horizontal juga merupakan fitur penting dari seluruh sistem pemerintah, yaitu diantara organisasi-organisasi yang berbeda dalam level yang sama di pemerintah dan dalam organisasi yang sama atau informal organisasi. Namun hal ini tidak termasuk dalam pemerintahan yang terhubung.
- b. Interaksi yang didasarkan pada kerjasama. Network bekerja tanpa adanya paksaan. Mereka

bekerja bersama-sama karena adanya nilai dan kepentingan bersama untuk mencapai hasil tertentu. Nilai dan kepentingan ini mungkin tidak sepenuhnya sama. Beberapa kepentingan pribadi atau kelompok sangat dimungkinkan ada namun tidak tunggal atau dominan.

- c. Relative independen dari kontrol salah satu pihak dan memiliki otoritas dalam setiap tindakannya. Network adalah self-organising.

Lebih lanjut, Osborne (2010) mengklasifikasikan bahwa paradigma dari new public governance sebagai evolusi ketiga dari public administration kemudian new public management memiliki akar teori, sifat dari negara, fokus, penekanan, hubungan kepada partner organisasi eksternal, mekanisme governance, serta dasar nilai yang berbeda. New public governance memiliki akar teori network dan sosiologi organisasi, sifat dari negara yang plural dan merupakan pluralist, berfokus pada inter-organisational governance, menekankan proses pelayanan dan hasil, dalam relasi dengan eksternal organisasi merupakan suppliers serta sering

menjadi agen yang inter dependent dalam hubungan yang berkelanjutan, mekanisme governancenya adalah kontrak hubungan atau kepercayaan, serta dasar nilainya adalah neo-corporatist.

Dalam proses inovasi ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Dalam konteks ini adalah community atau civil society. Hal ini tergolong dalam konsep dan teori dari grassroots innovations, yaitu pergerakan sosial dari kelas bawah yang berfokus pada penggunaan inovasi untuk memberdayakan komunitas lokal, menjaga dan meningkatkan produksi lokal, serta melibatkan potensi indigenous (Seyfang & Haxeltine, 2012). Burnett and Walker (2010) menekankan bahwa inovasi tidak akan lepas dari pengaruh politik dalam mengatasi isu sosial eksklusion dan kemiskinan. Dimensi-dimensi kunci dari diskursus dalam grassroots innovation adalah (Smith et al., 2014):

1. Aplikable secara spesifik dan menyeluruh dalam kondisi lokal. Hal ini mendorong solusi berbasis projek secara lokal.

2. Hal ini mendorong munculnya praktek sosio-teknis dalam sistem-sistem nilai yang berbeda.
3. Hal ini menstimulus debat tentang reformasi sosial, perubahan struktural dan transformasi berkenaan dengan struktur-struktur politik dan ekonomi yang masih ada.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan peneliti untuk dengan menyebarkan kuesioner kepada beberapa responden. Sementara dalam metode kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan seluruh unsur yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam penelitian yang menjadi informan, meliputi :

- 1) Aparatur Desa Nglenggreng
- 2) Aparatur Dinas UMKM dan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul
- 3) Civil society
- 4) UMKM, pedagang asongan, dan masyarakat umum

Data sekunder dalam penelitian ini yang berasal dokumen-dokumen Desa Nglenggeng dan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa kepustakaan, observasi, dan wawancara.

Teknik yang digunakan dalam Analisis Data adalah model alir. Menurut Miles dan Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek politik di Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul melakukan framing inovasi dalam bidang pariwisata

Dalam aspek politik, Rummaya et al. (2020) berpendapat bahwa untuk kasus pemilihan lokal di Indonesia, indikator GDP per kapita dan pengangguran memiliki dampak positif terhadap hasil pilkada. Namun, *competence* (performa ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah) lebih berpengaruh dari pada *luck* (performa ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dikarenakan pengaruh dari ekonomi nasional). Lebih lanjut, penelitian ini memiliki hipotesis awal berpendapat bahwa pemilih lebih memberikan perhatian kepada performa inkumben pada akhir tahun masa jabatannya.

(1992 : 17) model alir yang menjadi perhatian peneliti adalah pengaturan waktu, penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data dan analisis data dan pasca pengumpulan data. Pada model alir ini, peneliti melakukan ketiga kegiatan analisis secara bersamaan antara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

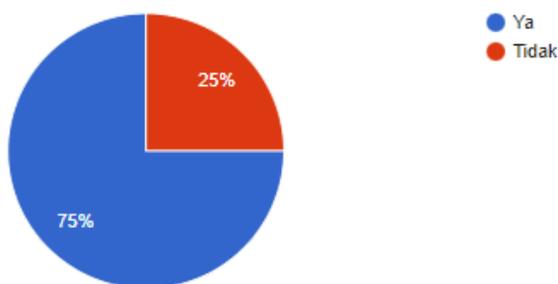
Dengan konteks daerah yang identic dengan keunggulan wisata, para inkumben akan berfikir penuh bagaimana meningkatkan potensi wisata didaerah tersebut dengan melakukan inovasi-inovasi.

Namun, hasil penelitian di desa Nglanggeran, politik dalam inovasi bukan berkaitan dalam pembentuk inovasi di desa Nglanggeran. Akan tetapi lebih berhubungan dengan bagaimana politisi, dalam hal ini yang diteliti adalah kepala daerah Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Desa Nglanggeran, menawarkan pengembangan dan megakomodasi inovasi yang dilakukan oleh pengelola desa wisata. Hal ini disebabkan oleh mekanisme inovasi desa wisata yang tidak berasal dari ide dan gagasan pemerintah melainkan ide dan gagasan dari

masyarakat. Sehingga calon kepala daerah dan kepala desa fokus pada fasilitasi pengembangannya.

Sebagai contoh, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah terakhir yang diselenggarakan pada tahun 2020 semua pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati menyatakan bahwa mereka akan fokus pada pengembangan sector pariwisata. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 75% responden menyatakan bahwa calon kepala daerah akan menyinggung pengembangan desa wisata dan UMKM dalam kampanyenya di desa Nglanggeran.

Gambar 1. Janji Kampanye Calon Kepala Daerah di Bidang Pariwisata dan UMKM di Desa Nglanggeran



Sumber: diolah penulis, 2021

Bahkan pasangan calon yang akhirnya memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunungkidul secara gamblang menyatakan bahwa sector pariwisata adalah prioritasnya. Pasangan

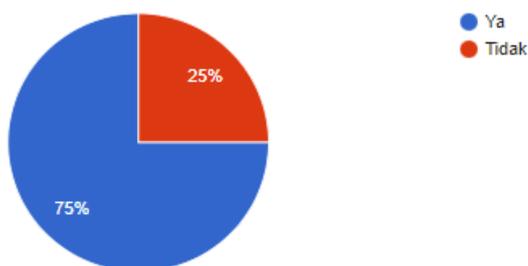
Sunaryanta-Heri Susanto menjanjikan akan mewujudkan Pariwisata Kelas Dunia, yaitu keseluruhan kegiatan tatakelola potensi daerah yang terkait dengan kepariwisataan dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha yang dikelola secara baik dan professional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Kidul di tahun 2015 juga menunjukkan hal sama. Keempat calon kepala daerah yang maju menekankan program pengembangan pariwisata sebagai salah satu program prioritasnya. Keempat pasangan tersebut yaitu pasangan inkumben, Badingah-Immawan Wahyudi, yang diusung partai PAN, Golkar, Hanura, NasDem, dan PPP. Lalu pasangan Subardi-Wahyu Putranto yang diusung Partai Gerindra, PKS, PKB, dan Partai Demokrat. Djangkung Sudjarwadi-Endah Subekti Kuntaringsih yang diusung PDI

Perjuangan. Dari jalur perseorangan ada Benyamin Sudarmardi-Mustangid.

Lebih lanjut, responden juga menyatakan bahwa sebuah kesalahan besar apabila calon Bupati tidak menyampaikan bahwa pariwisata adalah prioritasnya. Hal ini disebabkan bahwa dua bidang ini yang memang menjadi unggulan Kabupaten Gunungkidul saat ini. Bahkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepada desa pun trend-nya sama. Yakni calon kepala desa mengusung dan menyampaikan komitmen terhadap pariwisata dalam janji kampanyenya. Sebagaimana hasil dari penelitian ini:

Gambar 2. Janji Kampanye Calon Kepala Desa di Bidang Pariwisata

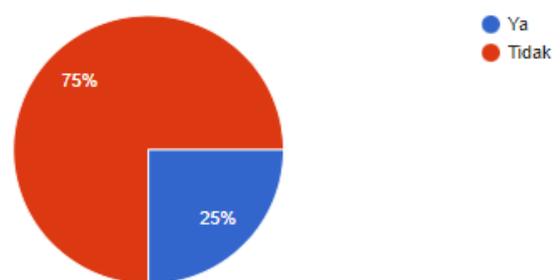


Sumber: diolah penulis, 2021

Akan tetapi, yang menarik adalah bahwa ternyata responden menyatakan bahwa janji pengembangan desa wisata Nglanggeran bukanlah dasar masyarakat memilih calon Bupati.

Sebagaimana terlihat dalam grafik berikut dimana 75% menyatakan janji pengembangan desa wisata bukanlah alasan warga dalam memilih kepala daerah.

Gambar 3. Persentase warga memilih berdasarkan janji pengembangan wisata



Sumber: diolah penulis, 2021

Mereka menyatakan bahwa alasan memilih mereka lebih condong pada peningkatan UMKM serta janji peningkatan akses dan kualitas bidang Pendidikan. Hal ini cukup menarik mengingat bahwa desa wisata Nglanggeran memiliki fokus pada pengembangan pariwisata namun, dalam menentukan pilihan politik, janji tersebut justru bukan menjadi alasan warga dalam menentukan pilihannya.

Hal tersebut tidak terlepas dari profil pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk Desa Nglanggeran. Berdasarkan tabel di bawah ini menunjukkan bahwa dari populasi penduduk yang tercatat mencapai

2.583 jiwa dengan 795 kepala keluarga, 1.295 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki atau 50,14% dari total keseluruhan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.288 jiwa atau 49,86% dari total keseluruhan jumlah penduduk. Pekerjaan dari seluruh penduduk tersebut adalah pada petani sebesar 30,20 persen, belum bekerja 19,48 persen, pelajar/mahasiswa 12,91 persen, mengurus rumah tangga 10,38 persen, karyawan swasta 9,17 persen, buruh harian lepas 7,32 persen, PNS, 1,13 persen, perangkat desa 0,49 persen, dan sopir 0,38 persen.

Tabel 1. Kependudukan berdasar Pekerjaan.

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	PETANI/PERKEBUNAN	800	30.20%	366	13.82%	434	16.38%
2	BELUM/TIDAK BEKERJA	516	19.48%	262	9.89%	254	9.59%
3	PELAJAR/MAHASISWA	342	12.91%	189	7.13%	153	5.78%
4	MENGURUS RUMAH TANGGA	275	10.38%	0	0.00%	275	10.38%
5	KARYAWAN SWASTA	243	9.17%	153	5.78%	90	3.40%
6	BURUH HARIAN LEPAS	194	7.32%	142	5.36%	52	1.96%
7	WIRASWASTA	184	6.95%	149	5.62%	35	1.32%
8	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	30	1.13%	19	0.72%	11	0.42%
9	PERANGKAT DESA	13	0.49%	8	0.30%	5	0.19%
10	SOPIR	10	0.38%	10	0.38%	0	0.00%

Sumber: Desa Nglanggeran 2021.

Profil pendidikan yang ada di Desa Nglanggeran juga mendukung hasil di atas, dimana kondisi pendidikan penduduk masih tergolong rendah. Tabel data pendidikan per Kepala Keluarga di

bawah menunjukkan bahwa 20,84 persen penduduk tidak sekolah, 26,09 persen tamat sekolah dasar, 22,54 persen tamat sekolah menengah pertama, 19,86 persen tamat sekolah menengah atas, 7,89 persen belum tamat sekolah dasar, 1,59 persen diploma IV/ strata 1, 0,6 persen diploma III, 0,49 persen diploma I/II, dan 0 persen strata II serta III. Dengan kata lain, penduduk dengan lulusan pasca sekolah menengah atas tidak lebih dari 4 persen.

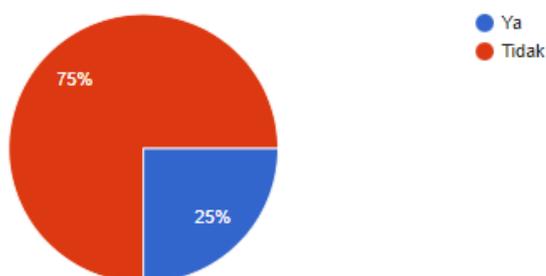
Tabel 2. Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	TAMAT SD / SEDERAJAT	691	26.09%	339	12.80%	352	13.29%
2	SLTP/SEDERAJAT	597	22.54%	325	12.27%	272	10.27%
3	TIDAK / BELUM SEKOLAH	552	20.84%	237	8.95%	315	11.89%
4	SLTA / SEDERAJAT	526	19.86%	283	10.68%	243	9.17%
5	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	209	7.89%	112	4.23%	97	3.66%
6	DIPLOMA IV/ STRATA I	42	1.59%	17	0.64%	25	0.94%
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	16	0.60%	7	0.26%	9	0.34%
8	DIPLOMA I / II	13	0.49%	3	0.11%	10	0.38%
9	STRATA III	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	STRATA II	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL		2649	100%	1325	50.02%	1324	49.98%

Sumber: Desa Nglanggeran 2021.

Hal ini juga terjadi pada proses pemilihan kepala desa dimana janji peningkatan kesejahteraan secara umum menjadi alasan utama dalam memilih kepala desa.

Gambar 4. Persentase Warga Memilih berdasar Janji Kesejahteraan



Sumber: diolah Penulis, 2021

Fenomena ini bisa disebabkan bahwa memang desa wisata Nglanggeran sudah bisa dikatakan *established* dimana mereka bisa berkembang dengan apa yang mereka miliki saat ini. Lebih lanjut, warga desa melihat aspek lain yang masih perlu dikembangkan yakni terutama behubungan langsung dengan kesejahteraan warga terutama mereka yang tidak berkecimpung dalam bidang pariwisata dan juga termasuk pendidikannya. Berdasarkan wawancara dengan informan berupa pegiat wisata dan perangkat desa dinyatakan bahwa kurang lebih 50 persen dari total penduduk di Desa Nglanggeran terlibat dalam sektor pariwisata. Dengan kata lain fenomena penyebab warga memilih kepala desa dan kepala daerah di atas yang bukan karena faktor pariwisata melainkan lebih kepada kesejahteraan dan

lapangan pekerjaan disebabkan karena warga yang terlibat di sektor pariwisata adalah 50 persen dari total jumlah penduduk.

Hal ini menunjukkan bahwa janji terkait inovasi dan pengembangan potensi desa tidak serta merta akan membuat warga memilih calon baik kepala daerah maupun kepala desa. Kasus pada desa Nglanggeran merupakan bukti terhadap kondisi tersebut. Akan tetapi hal ini juga disebabkan kondisi pariwisata desa yang sudah mandiri dan *established* sehingga muncul tuntutan pengembangan sector lain. Apabila desa wisata belum begitu berkembang, tidak menutup kemungkinan janji pengembangan pariwisata akan mampu menaikkan elektabilitas.

KESIMPULAN

Inovasi telah menjadi konsep yang tak terelakan dalam kebijakan pembangunan dewasa ini. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan ‘barang sosial’ seperti pengentasan kemiskinan yang berfokus pada solusi dari pasar inovatif, pembukaan akses pasar yang belum terjangkau, dan pengeksploitasian potensi kekayaan dari ‘bottom of the

pyramid'. Inovasi dalam pembangunan disyaratkan untuk mengadopsi unsur inklusivitas demi menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pengembangan dan inovasi telah dilaksanakan oleh desa Nglanggeran. Seringkali pelaksanaan inovasi pada sektor public berkaitan dengan komitmen politik. Inovasi sering dijadikan sebagai komoditas politik baik pra pemilihan maupun pasca pemilihan. Namun yang terjadi di desa Nglanggeran adalah bahwa inovasi yang sudah dilakukan oleh desa menjadi bargaining position bagi desa apabila ada pelaksanaan pemilihan baik kepala desa maupun kepala daerah. Para calon mayoritas akan menyatakan komitmen dalam mendukung pengembangan inovasi yang dilakukan. Para politisi tidak berjanji akan melakukan inovasi A atau B melainkan mendukung inovasi yang sudah ada dan yang akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Burnett, J., Senker, P., & Walker, K. (2010). *The Myths of Technology: Innovation and Inequality*. Information

Communication Society. 13(7), 1063-1065.

Chataway, J. & Hanlin, R. (2013). *Inclusive Innovation: An Architecture for Policy Development*. Innovation Knowledge Development.

Pansera, M., & Owen, R. (2019). *Innovation and Development: The Politics at the Bottom of the Pyramid*. John Wiley & Sons. Inc.

Dassonneville, R., & Lewis-Beck, M.S. (2014). *The Economic Voter and Economic Crisis*. *Acta Politic*. 49 (4), 369-371.

Key, V.O. (1966). *The Responsible Electorate: Rationality in Presidential Voting, 1936-1960*. Belknap Press. Cambridge, MA.

Osborne, S.P. (2010) *The New Public Governance?*, *Public Management Review*. 8(3), 377-387.

Rummaya, Rammohan, A., Purwono, R. & Harymawan, I. (2020). *The Local Economy and Re-election of Incumbent District leaders in Indonesia*. *Heliyon*, 6. (1-9).

Seyfang, G. & Haxeltine, A. (2012)
*Growing Grassroots
Innovations: Exploring the
Role of Community-Based
Initiatives in Governing
Sustainable Energy Transition.*
Environment and Planning C:
Governing and Policy, 30(3),
381-400.

Smith, A., Fressoli, M. & Thomas,
H. (2014). *Grassroots
Innovation Movements:
Challenges and Contributions.*
Journal of Cleaner Production.
63(1), 114-124.